



## **Framing Media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia Pada Demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR**

Naufal Rizqi Permana<sup>1)</sup>, Adi Nugroho<sup>2)</sup>, Budi Arista Romadhoni<sup>3)</sup>

Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Indonesia

[naufal.rizqi.co@gmail.com](mailto:naufal.rizqi.co@gmail.com)<sup>1)</sup>, [tugas.adi@gmail.com](mailto:tugas.adi@gmail.com)<sup>2)</sup>, [budhi.dhonimikom@gmail.com](mailto:budhi.dhonimikom@gmail.com)<sup>3)</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis *framing* media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia dalam pemberitaan demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR serta keterkaitannya dengan mekanisme agenda setting dalam membentuk persepsi publik. Gap penelitian terletak pada minimnya kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan analisis *framing* dengan agenda setting tingkat kedua dalam demonstrasi politik kontemporer yang dipengaruhi eskalasi konflik dan dinamika media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui analisis *framing* model Robert N. Entman yang dipadukan dengan Teori Agenda Setting untuk menelaah proses *transfer salience* dari agenda media ke agenda publik. Data diperoleh dari pemberitaan media *online* Kompas.id, Tempo.co, dan BBC Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media membingkai peristiwa yang sama dengan penonjolan isu dan atribut yang berbeda, sehingga menghasilkan konstruksi realitas yang tidak seragam dan memengaruhi orientasi kognitif publik terhadap legitimasi demonstrasi. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan relasi konseptual antara *framing* dan agenda setting sebagai proses yang saling terkait, sementara kontribusi praktisnya memberikan rujukan kritis bagi praktik jurnalistik dalam memberitakan aksi politik. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan literasi media kritis serta kebijakan komunikasi publik yang lebih sensitif terhadap dampak *framing* media. publik terhadap peristiwa politik dan pentingnya literasi media kritis.

**Kata kunci:** *Framing* Robert N. Entman, Agenda Setting Theory, Paradigma Interpretative, Demonstrasi DPR 2025, Media Indonesia

### **Abstract**

*This study analyzes the media framing of Kompas, Tempo, and BBC Indonesia in reporting the August 25, 2025 demonstration at the House of Representatives (DPR) and its relationship with the agenda-setting mechanism in shaping public perception. The research gap lies in the lack of studies that explicitly integrate framing analysis with second-level agenda-setting in contemporary political demonstrations influenced by escalating conflict and digital media dynamics. This study uses a descriptive qualitative approach with an interpretative paradigm through Robert N. Entman's framing model analysis combined with Agenda Setting Theory to examine the process of salience transfer from the media agenda to the public agenda. Data were obtained from online media coverage of Kompas.id, Tempo.co, and BBC Indonesia. The results show that the three media framed the same event with different emphasis on issues and attributes, resulting in a non-uniform construction of reality and influencing the public's cognitive orientation towards the legitimacy of the demonstration. The theoretical contribution of this study lies in strengthening the conceptual relationship between framing and agenda-setting as interrelated processes, while its practical contribution provides a critical reference for journalistic practices in reporting political action. These findings have implications for the importance of strengthening critical media literacy and public communication policies that are more sensitive to the impact of media framing on political events and the importance of critical media literacy.*

**Key words:** *Framing* Robert N. Entman, Agenda Setting Theory, Paradigma Interpretative, Demonstrasi DPR 2025, Media Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pada Senin, 25 Agustus 2025, media Kompas melaporkan terjadinya unjuk rasa yang dipicu oleh ajakan di media sosial yang beredar selama beberapa pekan dan berhasil memobilisasi massa untuk turun ke jalan. Aksi ini dipicu oleh keputusan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, serta diperparah oleh sikap sejumlah anggota DPR yang dianggap kurang empatik, sehingga memicu eskalasi emosi dan keributan dalam demonstrasi (Head, 2015). Polda Metro Jaya menyatakan bahwa aksi yang seharusnya menjadi sarana penyampaian aspirasi publik justru berakhir ricuh dan diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara data LBH Jakarta mencatat sekitar 370 orang ditangkap, dengan mayoritas merupakan remaja usia SMA/SMK, sehingga memunculkan keprihatinan atas keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi massa berisiko tinggi (Shestakova, 2019).



Sumber: <https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dengan-demonstrasi-25-agustus-di-dpr>

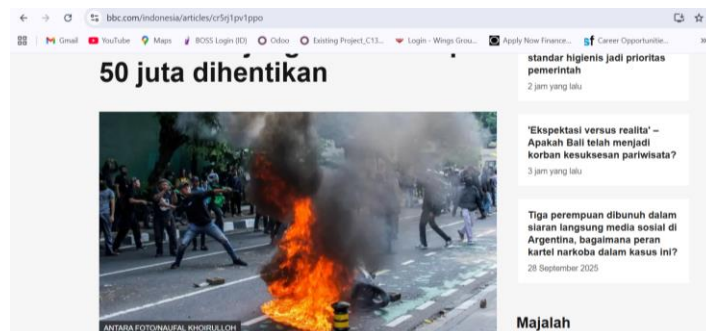
Dalam mediatisasi protes, peristiwa ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga dibentuk dan diperluas melalui pemberitaan media online serta sirkulasi informasi di media sosial. Penilaian akademisi menegaskan bahwa kegagalan DPR membaca aspirasi publik sejak dini memperlihatkan bagaimana media menjadi arena utama artikulasi kekecewaan politik sekaligus ruang konstruksi makna atas peristiwa tersebut (Jones, 2015).



Sumber: <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

Laporan media Tempo, menunjukkan bahwa demonstrasi 25 Agustus 2025 bermula dari pesan berantai di WhatsApp serta media sosial seperti Instagram dan TikTok yang dimobilisasi oleh kelompok "Revolusi Rakyat Indonesia" sejak hampir sepekan sebelumnya, membawa tuntutan politik radikal yang kemudian menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan (Indriani, 2022). Pada hari pelaksanaan, aksi yang diikuti ratusan massa berlangsung hingga malam tanpa dialog dengan anggota DPR dan berujung bentrokan dengan aparat di kawasan Pejompongan, yang semakin menyita perhatian publik karena melibatkan pelajar di bawah umur dan berujung pada penangkapan ratusan orang, (Kwako et al., 2023).

Eskalasi berlanjut pada 30 Agustus 2025 ketika isu keberadaan anggota DPR di luar negeri menyebar di media sosial dan memicu penjarahan rumah Ahmad Sahroni, yang disiarkan langsung melalui TikTok dan viral secara luas, menandai pergeseran protes dari tuntutan politik menjadi aksi anarkis (Biancalana & Mancosu, 2025). Aksi Rangkaian peristiwa ini menegaskan kuatnya mediatisasi protes, di mana dinamika aksi tidak hanya dibentuk di lapangan, tetapi juga dikonstruksi dan dipercepat oleh logika media sosial sebagai ruang akumulasi kemarahan publik, sehingga menjadikan studi *framing* penting untuk memahami bagaimana media membingkai eskalasi konflik dan membentuk persepsi politik masyarakat Indonesia (Van't Riet et al., 2018).



Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr5jr1pv1ppo>

Laporan BBC Indonesia pada Senin, 25 Agustus 2025, menunjukkan bahwa unjuk rasa di sekitar Kompleks Gedung DPR, Jakarta, mengalami pergeseran dari ekspresi aspirasi publik menjadi insiden penuh ketegangan, sekaligus menyoroti keterlibatan generasi muda dalam aksi politik jalanan. Demonstrasi yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat bermula dari kritik terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ketegangan meningkat sejak siang hari ketika aparat menggunakan gas air mata dan semprotan air untuk membubarkan massa, disertai aksi saling dorong, pelemparan benda, munculnya kelompok tambahan, hingga pembakaran sepeda motor yang memperluas skala bentrokan di sekitar gedung parlemen (Wulansari & Rosadi, 2018).

Menurut Daniel Winarta dari LBH Jakarta, sekitar 370 orang diamankan dalam aksi tersebut, dengan lebih dari setengahnya merupakan anak di bawah umur, sehingga memunculkan persoalan serius terkait hak anak, proporsionalitas penanganan aparat, serta menyempitnya ruang demokrasi bagi generasi muda. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bagaimana eskalasi protes tidak hanya dipahami sebagai kejadian lapangan, tetapi juga sebagai konstruksi media yang membentuk persepsi publik mengenai relasi negara, aparat, dan warga dalam praktik demokrasi Indonesia (Muhtadi et al., 2025).

Saat ini media *online* juga sudah menjadi arus utama sumber informasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia dikarenakan kemudahannya yang dapat diakses melalui ponsel. Jurnalistik media *online* yang menggunakan teknologi media digital juga memiliki karakteristik yakni memberikan penekanan lebih kepada kecepatan waktu dan keringkasan untuk dibaca (Murniati dan Hasfi, 2021). Atas dasar inilah media daring pun tidak lepas dari prinsip menaikkan *traffic* karena *traffic* berita berperan penting bagi perkembangan bisnis di industri media (Widiastuti, 2021).

Peneliti ingin mengetahui bagaimana *Framing* Media *Kompas*, *Tempo*, dan *BBC* Indonesia Mengubah Citra Demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR dalam pemberitannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* yang dilakukan oleh **Kompas**, **Tempo**, dan **BBC Indonesia** membentuk citra demonstrasi 25 Agustus 2025 di mata publik. Dengan membedah *framing* naratif dari ketiga media tersebut, serta penelitian ini ingin melihat apakah demonstrasi diposisikan sebagai ekspresi aspirasi masyarakat Indonesia, dan bahkan sebagai bentuk kerusuhan yang mengganggu stabilitas Negara.

## METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana media membingkai realitas sosial dan politik melalui teks berita. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berupaya mengukur frekuensi atau hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan menafsirkan makna, narasi, serta penonjolan isu yang dibangun media dalam memberitakan demonstrasi 25 Agustus 2025 di Gedung DPR. Analisis dilakukan dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan, yang kemudian dipadukan dengan Teori Agenda Setting, khususnya agenda setting tingkat kedua, untuk melihat bagaimana atribut isu ditonjolkan dan ditransfer dari agenda media ke agenda publik. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menafsirkan teks berita dengan mengaitkan konteks sosial, politik, serta dinamika media digital yang melingkupi peristiwa demonstrasi tersebut, sehingga makna yang dihasilkan tidak dilepaskan dari situasi historis dan struktur kekuasaan yang ada.

Pemilihan rentang waktu pemberitaan ditetapkan sejak 25 Agustus 2025, yaitu hari terjadinya demonstrasi di DPR, hingga 30 Agustus 2025, ketika eskalasi peristiwa masih menjadi agenda utama media dan berkembang ke isu lanjutan seperti penangkapan massal, keterlibatan pelajar, serta penjarahan yang viral di media sosial. Penetapan rentang waktu ini dimaksudkan untuk menangkap dinamika *framing* sejak fase awal demonstrasi, puncak eskalasi konflik, hingga narasi lanjutan yang memperkuat atau menggeser makna peristiwa di ruang publik.

Kata kunci pencarian artikel berita ditentukan berdasarkan relevansi langsung dengan peristiwa dan aktor utama yang diteliti, yaitu “Demonstrasi 25 Agustus 2025 DPR”, “Demo DPR Agustus 2025”, “Tunjangan DPR 50 juta”, “Kerusuhan DPR”, “Penangkapan demonstran DPR”, serta variasi kata kunci lain yang memuat unsur waktu, lokasi, dan isu kebijakan yang diprotes. Penggunaan kata kunci ini bertujuan untuk memastikan bahwa artikel yang terpilih benar-benar berfokus pada demonstrasi 25 Agustus 2025 dan tidak melebar ke isu politik lain yang tidak berkaitan langsung. Selain itu, artikel yang dipilih harus berbentuk berita langsung (*straight news*), dan laporan mendalam (*in-depth news*), bukan opini, editorial, atau artikel feature, agar *framing* yang dianalisis merepresentasikan konstruksi realitas jurnalistik, bukan pandangan subjektif redaksi secara eksplisit.

Jumlah artikel yang dianalisis ditentukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan kedalaman analisis dan keberagaman *framing*, bukan semata-mata kuantitas. Dari masing-masing media, yaitu Kompas.id, Tempo.co, dan BBC Indonesia, dipilih antara tiga hingga lima artikel utama yang paling representatif, sehingga total artikel yang dianalisis berkisar antara sembilan hingga lima belas artikel berita. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan intensitas penonjolan isu, kelengkapan narasi, serta keberadaan kutipan aktor kunci seperti aparat keamanan, perwakilan DPR, aktivis, dan lembaga bantuan hukum. Pemilihan jumlah ini dinilai memadai untuk menggambarkan pola *framing* masing-masing media secara komprehensif, sekaligus memungkinkan analisis mendalam terhadap setiap elemen *framing* Entman tanpa kehilangan konteks sosial dan politik yang menyertainya. Dengan kriteria tersebut, data yang digunakan diharapkan mampu merepresentasikan cara media membangun makna demonstrasi 25 Agustus 2025 serta perannya dalam membentuk persepsi publik melalui mekanisme *framing* dan agenda setting.

Dalam teori *framing* Entman, *framing* dipahami sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas yang disajikan dalam teks media, dengan tujuan untuk menegaskan interpretasi tertentu terhadap suatu peristiwa. Media, melalui proses *framing*, tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan solusi terhadap isu yang diangkat. Empat elemen inilah yang menjadi inti dari model analisis Entman. Terdapat empat tahap *Framing* Entman yaitu *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation* (Boer et al, 2020).

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), yaitu tahap awal di mana media menentukan bagaimana suatu peristiwa atau isu dipahami dan dimaknai. Dalam tahap ini, media memilih

aspek apa yang dianggap sebagai inti persoalan dan bagaimana masalah tersebut dipresentasikan kepada khalayak.

2. *Diagnose Causes* (Mendiagnosis Penyebab), yaitu tahap yang berfungsi untuk mengidentifikasi siapa atau apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Dalam tahap ini, media memilih aktor utama yang dianggap bertanggung jawab atas timbulnya peristiwa. Entman menegaskan bahwa tahap ini tidak selalu berarti menunjuk pelaku secara eksplisit, tetapi juga membingkai aspek sosial serta politik yang melatarbelakangi masalah.
3. *Make Moral Judgment* (Penilaian Moral), yaitu elemen *framing* yang berkaitan dengan bagaimana media memberikan penilaian moral atas peristiwa dan aktor yang terlibat. Elemen ini mencerminkan nilai-nilai ideologis yang diusung media. Dalam tahap ini, media dapat menggunakan bahasa, narasi, dan kutipan sumber berita untuk memberikan pembenaran ataupun kecaman terhadap tindakan tertentu.
4. *Treatment Recommendation* (Rekomendasi Penanganan), yaitu tahap di mana media menyampaikan solusi atau tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis *Framing* Media Kompas

Media Kompas membingkai peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025 dengan mendefinisikan masalah (*define problems*) sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar dan merupakan ekspresi sah dari aspirasi publik. Dalam narasi pemberitaannya, media Kompas tidak menempatkan demonstrasi tersebut sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai manifestasi “suara rakyat” yang tersumbat. Fokus utamanya adalah pada substansi tuntutan massa terkait penolakan tunjangan perumahan DPR yang fantastis di tengah kesulitan ekonomi, serta upaya penyampaian pendapat di ruang publik. Media Kompas cenderung meminimalkan visualisasi kekerasan atau bentrokan fisik yang ekstrem, dan lebih memilih untuk menonjolkan suasana penyampaian pendapat, sehingga masalah dilihat sebagai isu prosedural demokrasi, bukan masalah kriminalitas atau anarki sosial.

Dalam aspek diagnosis penyebab (*diagnose causes*), media Kompas mengidentifikasi akar permasalahan terletak pada akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja dan sensibilitas anggota dewan. Media Kompas secara spesifik menyoroti bahwa kemarahan massa dipicu oleh keputusan DPR menaikkan tunjangan fasilitas di saat yang tidak tepat, serta sikap anggota dewan yang dinilai abai dan tidak empatik terhadap kondisi rakyat. Penyebab konflik bukan dialamatkan pada mahasiswa yang turun ke jalan, melainkan pada kegagalan komunikasi politik dan ketidakmampuan legislator dalam menangkap sinyal keresahan masyarakat sebelum membesar menjadi aksi massa.

Terkait penilaian moral (*make moral judgment*), media Kompas memberikan penilaian yang cenderung simpatik terhadap para demonstran namun tetap konservatif dalam menjaga ketertiban. Media Kompas menilai bahwa tindakan protes sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, sembari secara implisit memberikan teguran moral kepada anggota DPR untuk tidak “tutup kuping”. Namun, media Kompas tetap memegang nilai ketertiban umum dengan menekankan pentingnya menjaga fasilitas publik, yang menyiratkan bahwa protes boleh dilakukan selama tidak merusak simbol-simbol negara. Moralitas yang dibangun adalah keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas sosial.

Sebagai rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*), media Kompas menyarankan pendekatan dialogis dan introspektif. Solusi yang ditawarkan bukanlah pembubaran paksa atau tindakan represif, melainkan imbauan agar DPR melakukan refleksi diri dan lebih proaktif dalam merespons aspirasi kritis masyarakat melalui jalur-jalur komunikasi yang ada. Media Kompas mendorong agar saluran dialog dibuka selebar-lebarnya agar kepercayaan rakyat dapat dipulihkan, menegaskan bahwa solusi dari masalah ini adalah perbaikan kinerja politik, bukan pendekatan keamanan semata.

### Analisis *Framing* Media Tempo



Berbeda dengan media Kompas, media Tempo mendefinisikan masalah (*define problems*) demonstrasi 25 Agustus di DPR dengan *framing* yang lebih keras, yakni sebagai perlawanan rakyat yang bereskalasi menjadi kekacauan akibat ketidakadilan struktural. Media Tempo melihat peristiwa ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah ledakan kemarahan yang mengarah pada pembangkangan sipil dan anarki, seperti yang tercermin dalam sorotan mereka terhadap insiden penjarahan rumah wakil rakyat. Media Tempo, masalah utamanya adalah pecahnya kontrak sosial antara rakyat dan wakilnya yang memicu tindakan putus asa dan destruktif dari massa.

Dalam mendiagnosis penyebab (*diagnose causes*), media Tempo menunjuk “pengkhianatan” elit politik sebagai biang keladi utama. Narasi media Tempo secara tajam mengaitkan kemarahan massa dengan fakta bahwa sejumlah anggota dewan justru berada di luar negeri saat rakyat sedang berjuang menyuarakan aspirasi di jalanan. Selain itu, media Tempo juga mendiagnosis bahwa eskalasi kekerasan terjadi akibat provokasi yang menyebar cepat melalui media sosial dan pesan berantai, serta akumulasi dugaan korupsi dan politik dinasti yang menyeret nama-nama besar. Media Tempo membangun kausalitas bahwa tindakan anarkis massa adalah reaksi langsung dari ketidakpedulian dan arogansi penguasa.

Penilaian moral (*make moral judgment*) yang dibangun media Tempo sangat kritis terhadap elit penguasa. Media Tempo memposisikan demonstran, termasuk masyarakat yang bertindak anarkis sebagai korban dari sistem yang tidak adil, sementara anggota DPR dan pejabat pemerintah ditempatkan sebagai antagonis yang memicu kemarahan tersebut. Meskipun media Tempo memberitakan penjarahan, *framing* moralnya cenderung mengajak pembaca memaklumi “mengapa” hal itu terjadi, yakni sebagai kulminasi dari rasa sakit hati publik yang mendalam.

Rekomendasi penanganan (*treatment recommendation*) yang tersirat dari narasi media Tempo adalah perlunya perombakan fundamental dan pengawasan ketat terhadap kekuasaan. Media Tempo tidak sekadar menyarankan dialog, tetapi menyuarakan desakan untuk penegakan hukum terhadap korupsi dan penghentian praktik-praktik politik yang merugikan rakyat, seperti tunjangan berlebih dan politik dinasti. Solusi yang ditawarkan bersifat korektif-agresif, menuntut akuntabilitas penuh dari pejabat publik dan transparansi yang radikal untuk meredam potensi revolusi sosial yang lebih besar.

### **Analisis Framing Media BBC Indonesia**

Media BBC Indonesia membingkai peristiwa ini dengan *define problems* (*pendefinisian masalah*) yang berfokus pada ketidakstabilan politik dan konflik kekerasan antara negara dan warganya. BBC melihat demonstrasi 25 Agustus di DPR bukan hanya soal aspirasi domestik, melainkan sebagai tanda bahaya (*red flag*) mengenai kerapuhan stabilitas keamanan di Indonesia. Masalah utama bagi media BBC Indonesia adalah kegagalan negara dalam mengelola perbedaan pendapat yang berujung pada bentrokan fisik, penggunaan gas air mata, dan pelibatan anak di bawah umur dalam konflik politik yang berbahaya.

Dalam hal diagnosis penyebab (*diagnose causes*), media BBC Indonesia menekankan pada pendekatan represif aparat keamanan sebagai pemicu eskalasi. Media BBC Indonesia banyak menyoroti penggunaan kekuatan berlebih seperti gas air mata dan semprotan air (*water cannon*) yang memicu reaksi balasan dari massa berupa pelemparan batu dan pembakaran. Penyebab kerusakan, dalam kaca mata media BBC Indonesia, adalah ketidakmampuan aparat dalam memfasilitasi protes secara damai dan kecenderungan menggunakan cara-cara militeristik dalam menghadapi sipil, serta adanya mobilisasi demografis rentan (pelajar) yang memperkeruh situasi lapangan.

Penilaian moral (*make moral judgment*) media BBC Indonesia sangat kental dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan sipil. Media BBC Indonesia menghakimi tindakan aparat yang menangkap ratusan demonstran, terutama anak-anak, sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak dasar dan ruang demokrasi. Penilaian moralnya diarahkan pada skeptisisme terhadap klaim keamanan negara, memposisikan Indonesia sebagai negara yang sedang “tidak baik-baik saja” dalam hal kebebasan sipil. Citra yang dibangun adalah keprihatinan internasional terhadap cara Indonesia menangani perbedaan pendapat.

Terakhir, rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) dari media BBC Indonesia mengarah pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanganan demonstrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Media BBC Indonesia secara implisit menyarankan agar pemerintah Indonesia memperbaiki catatan HAM dan menjamin ruang demokrasi yang aman bagi warganya, termasuk generasi muda. Solusinya bukan pada pembubaran massa, melainkan pada reformasi institusi keamanan agar lebih humanis dan demokratis dalam menghadapi kritik warganya, demi memulihkan citra stabilitas Indonesia di mata komunitas global.

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan secara jelas bahwa bagaimana perbedaan *framing* yang dibangun oleh media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia tidak hanya merefleksikan sudut pandang redaksional masing-masing media, tetapi juga menunjukkan bekerjanya mekanisme Agenda Setting Tingkat Kedua dalam politik Indonesia. Ketiga media tersebut melaporkan objek yang sama, yakni demonstrasi 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, namun perbedaan terletak pada atribut apa yang ditonjolkan dan bagaimana publik diarahkan untuk memaknai peristiwa tersebut. Dalam kerangka agenda setting level kedua, media tidak sekadar menentukan isu apa yang penting untuk dipikirkan publik, tetapi juga menentukan bagaimana isu tersebut harus dipahami, dievaluasi, dan dinilai secara moral. Media Kompas, sebagaimana telah dianalisis, menonjolkan atribut demokratis dari demonstrasi dengan menempatkannya sebagai ekspresi sah aspirasi rakyat dan dinamika politik yang wajar. Atribut yang disorot adalah substansi tuntutan, etika dialog, serta pentingnya refleksi institusional DPR. Penonjolan atribut ini mentransfer *salience* ke publik bahwa inti persoalan bukan pada kerusuhan, melainkan pada kegagalan komunikasi politik dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap anggota DPR, sehingga orientasi *audience* diarahkan pada pembacaan normatif-demokratis atas peristiwa tersebut.

Berbeda dengan Kompas, media Tempo secara konsisten menonjolkan atribut konflik, kekacauan, dan ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga. Dalam agenda setting tingkat kedua, Tempo mentransfer *salience* atribut “kerusuhan”, “tindakan represif”, “penangkapan massal”, serta “keterlibatan pelajar” sebagai elemen dominan dalam narasi demonstrasi. Dengan menonjolkan bentrokan di kolong jembatan Pejompongan, penjarahan rumah Ahmad Sahroni, serta eskalasi emosi yang dipicu oleh ketidakpedulian elit politik, media Tempo membingkai demonstrasi sebagai konsekuensi logis dari kegagalan struktural dan pengkhianatan elit terhadap rakyat. Atribut-atribut tersebut membentuk orientasi kognitif *audience* untuk memandang peristiwa sebagai simbol krisis keadilan dan delegitimasi institusi negara, sehingga kemarahan publik diposisikan sebagai respons yang dapat dipahami, meskipun tidak selalu dibenarkan secara normatif. Sehingga, dalam agenda setting tingkat kedua bekerja dengan mengarahkan publik untuk menilai aktor negara sebagai sumber masalah utama, sementara kekacauan dipahami sebagai gejala, bukan sebab.

Sementara itu, media BBC Indonesia menampilkan perbedaan yang cukup signifikan dengan memosisikan demonstrasi 25 Agustus 2025 dalam kerangka yang lebih luas, yakni ketidakstabilan politik dan citra Indonesia di mata internasional. BBC Indonesia menonjolkan atribut pelanggaran hak asasi manusia, proporsionalitas penggunaan kekuatan aparat, serta tingginya jumlah penangkapan anak di bawah umur sebagai indikator problem struktural dalam pengelolaan demokrasi dan keamanan. Melalui agenda setting tingkat kedua, BBC mentransfer *salience* bahwa isu utama dari demonstrasi ini bukan semata tuntutan kebijakan tunjangan DPR atau kerusuhan jalanan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri dan bagaimana negara menangani ekspresi politik warganya. Atribut ini mendorong *audience* untuk memandang peristiwa tersebut sebagai alarm demokrasi, yang relevan tidak hanya bagi publik domestik tetapi juga komunitas internasional, sehingga orientasi persepsi publik bergerak ke arah evaluasi sistemik dan normatif atas praktik demokrasi Indonesia.

Perbandingan ketiga media ini menunjukkan bahwa agenda setting tingkat kedua bekerja secara kuat melalui seleksi dan penonjolan atribut isu yang berbeda-beda. Kompas membentuk agenda publik yang menekankan dialog dan prosedur demokrasi, Tempo membangun agenda

publik yang berorientasi pada konflik dan ketidakadilan struktural, sementara BBC Indonesia mengarahkan agenda publik pada isu stabilitas politik dan hak asasi manusia. Perbedaan ini membuktikan bahwa realitas sosial yang diterima publik bukanlah cerminan langsung dari peristiwa, melainkan hasil konstruksi media melalui penekanan atribut tertentu yang dianggap paling relevan oleh masing-masing media. Dalam konteks politik Indonesia, temuan ini menegaskan bahwa media memiliki peran strategis tidak hanya dalam menentukan isu apa yang penting, tetapi juga dalam membentuk kerangka penilaian publik terhadap legitimasi aksi massa, kinerja institusi negara, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, studi ini menegaskan pentingnya literasi media kritis, agar publik mampu menyadari bahwa perbedaan framing bukan sekadar variasi gaya pemberitaan, melainkan bagian dari proses agenda setting yang secara langsung memengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai realitas politik.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan demonstrasi 25 Agustus 2025 oleh media Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia membangun *framing* yang berbeda meskipun melaporkan peristiwa yang sama. Kompas menonjolkan demonstrasi sebagai ekspresi demokrasi dan pentingnya dialog, Tempo menekankan konflik, kekacauan, serta kegagalan elit politik, sementara BBC Indonesia memfokuskan perhatian pada ketidakstabilan politik, hak asasi manusia, dan citra Indonesia di tingkat internasional. Perbedaan penonjolan atribut isu tersebut membuktikan bekerjanya Agenda Setting Tingkat Kedua, di mana media tidak hanya menentukan isu yang penting, tetapi juga membentuk cara publik memaknai dan menilai peristiwa politik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar media lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam membingkai aksi politik, terutama dengan mempertimbangkan dampak sosial dari penonjolan atribut tertentu. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan komunikasi publik yang lebih proaktif dan transparan untuk mencegah eskalasi konflik dan kesenjangan persepsi. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi media kritis agar mampu memahami perbedaan framing dan tidak menerima konstruksi realitas media secara mentah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press. ISBN 978-623-97534-3-6
- Ainani, M., & Hamdie, N. T. A. (2025). Analisis komparatif *framing* media lokal dan nasional pada kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan. *PIKMA: Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 7(2), 321–337. <https://doi.org/10.24076/pikma.v7i2.2002>
- Akbar, A. (2021). *Framing* pemberitaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada media Tirto.id dan Republika.co.id. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 138–149. DOI: <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.138-149>
- Al Banna, M. N., & Handayani, W. (2025). Putusan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi: Analisis *framing* pemberitaan di Instagram. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v8i1.23728>
- Amrin, A., Suherman, A., & Wa Nurfida. (2024). *Framing* analysis of the report on the murder of Brigadir J in online media CNNIndonesia.com (*Analisis Framing Pemberitaan Pembunuhan Brigadir J di Media Online CNNIndonesia.com*). *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2). <https://doi.org/10.21070/kanal.v12i2.1760>
- Arianti, G., Irfan, E., Haroni, N., & Rizqullah, M. S. (2025). Analisis *framing* berita di media lembaga pemerintah terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. <https://doi.org/10.56873/jskm.2025.5981>
- Bayuaji, B. W., & Monggilo, Z. M. Z. (2022). Konstruksi realitas pengukuran tanah di Wadas dalam media online nasional: Analisis *framing* pemberitaan isu Wadas di *Tempo.co* periode 8–11 Februari 2022. *Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia*, 3(2). Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.22146/jmki.88338>



- Biancalana, C., & Mancosu, M. (2025). Is the public legitimacy of protests rooted in the political context? An experimental study comparing protests by environmentalists and farmers. *Rivista Italiana Di Scienza Politica*, 238–250. <https://doi.org/10.1017/ipo.2025.3>
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis *framing* pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait Covid-19 di media online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85–104. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>
- Head, N. (2015). A politics of empathy: Encounters with empathy in Israel and Palestine. *Review of International Studies*, 42(1), 95–113. <https://doi.org/10.1017/S0260210515000108>
- Hernawati, T. N. D., Hasfi, N., & Sulistyani, H. D. (2023). Bingkai minoritas LGBTQ di media alternatif Konde.co. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(4), 355–370. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/41332>
- Hutami, M. F., & Sjafirah, N. A. (2018). *Framing* media online Tribunnews.com terhadap sosok perempuan dalam berita video pornografi Depok. *Kajian Jurnalisme*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.24198/jki>
- Indriani, S. (2022). Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia. *Nurani*, 22(2), 315–328. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>
- Jones, D. R. (2015). Declining trust in congress: Effects of polarization and consequences for democracy. *Forum (Germany)*, 13(3), 375–394. <https://doi.org/10.1515/for-2015-0027>
- Kwako, A., Rogers, J., Earl, J., & Kahne, J. (2023). Principals' Responses to Student Gun Violence Protests: Deter, Manage, or Educate for Democracy? *Teachers College Record*, 125(2), 131–177. <https://doi.org/10.1177/01614681231163629>
- Latifah Murniati, R., & Hasfi, N. (2021). Analisis *Framing* Pemberitaan Tindak Dan Upaya Bunuh Diri di tribunnews.com. *Interaksi Online*, 9(2), 40-52. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/30210>
- Littlejohn, S. W. (2011). Teori Komunikasi Theories of Human Communication.
- Marlene, & Kho, G. R. M. (2024). Echoes of allegiance: Analisis *framing* berita keberpihakan Jokowi oleh Tempo dan Viva Group. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.35760/mkm.2024.v8i2.13385>
- Muhtadi, B., Warburton, E. A., & Gammon, L. (2025). Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians. *Journal of East Asian Studies*, 1–28. <https://doi.org/10.1017/jea.2025.10011>
- Mustika, R. (2017). Analisis *framing* pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 135–148. DOI: <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>
- Permadi, D., Muyassaroh, I. S., Purnaweni, H., & Widodo, A. S. (2024). Media massa dan konstruksi realitas: Analisis *framing* terhadap pemberitaan UU IKN pada media online *Tempo.co* dan *Mediaindonesia.com*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>
- Rakatiwi, Y., & Sazali, H. (2024). *Framing* analysis of Anies Baswedan's political identity as an innovative campaign on TikTok. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 7(1), 95–112. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v7i1.5194>
- Rifat Farihi, H., Lukmantoro, T., & Hasfi, N. (2024). Analisis *Framing* Politik Identitas Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam Pemberitaan Pilpres 2024 di Media Indonesia. *Interaksi Online*, 12(4), 938-952. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/47464>
- Sabiq, M., Nawawi, I., & Arisnawawi. (2023). Circulation of production and *framing* of Islamic terrorism (Case study of three church bombings in Surabaya). *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 8(2). Universitas Islam Negeri Salatiga. <https://doi.org/10.18326/inject.v9i2.488>
- Sandi, M. R., Herawati, M., & Adiprasetyo, J. (2022). *Framing* media online Detik.com terhadap pemberitaan korban pengerooyokan oleh Bobotoh. *Kajian Jurnalisme*,



- 5(2). <https://doi.org/10.24198/jki.v5i2.28886>
- Santoso, Puji. 2021. *Framing* Pemberitaan Media Televisi Berita Terhadap Figur 'Habib'. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 19(3): 281–295. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i3.5335>
- Shestakova, E. (2019). Minors protest activity in the urban environment as a result of the impact of Internet technologies. *E3S Web of Conferences*, 91. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199108061>
- Sofian, A., & Lestari, N. (2021). Analisis *framing* pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis *framing* model Robert N. Entman pada media online *Koran.tempo.co* edisi Maret 2020). *COMMICAST*, 2(1), 58–70. <https://doi.org/10.12928/commicast.v2i1.3150>
- Suparto, A. D. (2017). Transitivity analysis on *framing* in the online news articles. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 7(1). <https://doi.org/10.26499/rnh.v7i1.586>
- Surya Mutumanikam, G., & Ratri Rahmaji, L. (2019). Pembungkahan Media Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemberitaan di detik.com. *Interaksi Online*, 8(1), 08–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/26191>
- Van't Riet, J., Schaap, G., & Kleemans, M. (2018). Fret not thyself: The persuasive effect of anger expression and the role of perceived appropriateness. *Motivation and Emotion*, 42(1), 103–117. <https://doi.org/10.1007/s11031-017-9661-3>
- Wardani, A., Suprayitno, D., & Wahyuningratna, R. N. (2023). *Framing* pemberitaan calon presiden pada media online CNNIndonesia.com dan Kompas.com. *PIKMA: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Media Massa*, 6(1), 54–79. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1181>
- Wazis, K. (2017). Media massa melawan teror: Analisis *framing* pada tajuk Koran Republika. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 257–276. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i2.1944>
- Wibisono, I. (2021). Analisis framing (dalam berita politik). CV Amerta Media. ISBN 978-623-6385-16-6.
- Widiastuti, T. (2021). The commodification of virtual community content in increasing media traffic. *Media and Communication*, 9(2), 98–109. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i2.3737>
- Wulansari, I. Y., & Rosadi, Y. (2018). Triple reproduction analysis of economy, social, and environment in Indonesia: A simultaneous panel data analysis using EC2SLS. *Journal of Physics: Conference Series*, 1028(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012237>
- Zawawi, M., Jambak, M. R., Hasanah, U., Basid, A., & Anas, K. (2024). *Framing* of Hamas attacks on Israel in Al-Jazeera and BBC coverage. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra*, 8(1), April 2024. DOI: <https://doi.org/10.21070/kanal.v12i2.1760>